

Judul : Bagir, Marzuki & Pabotinggi Membedah "Kedaruratan"
Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-9

PELUNCURAN BUKU AGUS SUDIBYO DIHADIRI KETUA DPR

Bagir, Marzuki & Pabotinggi Membedah "Kedaruratan"

SELAMA ini, banyak istilah yang ditempelkan dengan kata "darurat". Seperti darurat narkoba, darurat terorisme, darurat perekonomian, sampai darurat bencana alam. Apakah "kedaruratan" itu tepat? Hal itu dikupas tuntas dalam buku berjudul, "Demokrasi dan Kedaruratan, Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben" karya anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Kemarin, buku tersebut diluncurkan di Hall Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih Jakarta Pusat. Peluncuran ini dihadiri banyak tokoh. Antara lain

Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Pers M Nuh, Ketua Umum PWI Pusat periode 2008-2013 dan 2013-2018 Margiono, Ketua PWI Pusat Atal Dapari, tokoh pers Ilham Bintang, dan budayawan Sudjiwo Tedjo.

Buku tersebut juga dibedah oleh mantan Ketua MA Bagir Manan, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, dan akademisi Prof Mochtar Pabotinggi.

Agus menjelaskan, buku ini memproblematisir hubungan antara

keadaan darurat, status darurat, *state of exception*, dan demokrasi. Sejarah sendiri menunjukkan, demokrasi selalu lahir dari rahim keadaan darurat. Manifestasi keadaan darurat itu adalah revolusi, suksesi, reformasi, kudeta, hingga *people power*. "Namun pertanyaanya, bagaimana keadaan darurat ditempatkan dalam normalitas negara demokrasi," ucapnya.

Kedaruratan itu, kata Agus, kerap dinyatakan dalam keadaan yang sesu-

♦ BERSAMBUNG KE HAL 9

Bagir, Marzuki & Pabotinggi

... DARI HALAMAN 1

ngguhnya tidak benar-benar darurat, krisis. Bahkan, sering dideklarasikan dalam keadaan normal. Deklarasi itu dilakukan baik penguasa maupun lawan penguasa. "Masalahnya, deklarasi darurat ini adalah deklarasi penangguhan prinsip-prinsip demokrasi," tambah dia.

M Nuh memberi apresiasi tinggi. Menurut Nuh, buku Agus merupakan hasil karya keilmuan yang sangat menarik. "Menarik karena ada kata kedaruratan. Kombinasi antara sesuatu yang normal dan abnormal. Karena memang kehidupan selalu ada exception. Darurat itu termasuk exception. Sesuatu yang tadinya haram itu bisa halal, kalau kondisinya darurat," ucap mantan Mendikbud ini.

Sedangkan Bagir Manan lebih menekankan ke sisi demokrasi. Menurutnya, tidak ada definisi yang jelas mengenai demokrasi. Padahal, masalah tersebut sudah dikupas sejak beribu-ribu tahun lalu oleh banyak ilmuwan.

"Tak ada fenomena lain yang begitu hebat menjadi objek pengkajian dan pembicaraan ilmiah maupun nonilmiah. Mengapa? Karena sejak awal sebetulnya tidak ada definisi tentang demokrasi itu. Setiap orang dapat mendefinisikan demokrasi. Bahkan, ada tesis-tesis yang sama-sama klaim demokrasi tapi kontradiksi satu sama lain. Seperti demokrasi liberal, ternyata sangat kontradiktif dengan demokrasi di mahasiswa. Termasuk bidang hukum," jelasnya.

Ada pun Marzuki Darusman mengu-

pas Giorgia Agamben, filosof yang teorinya dipakai dalam buku tersebut. Kata Marzuki, Agamben secara gamblang mempersepsikan bahwa keadaan darurat merupakan hal yang melekat pada demokrasi dan yang bisa menghadirkan pengecualian.

"Sejak revolusi, proklamasi, Dekrit 5 Juli 1959, Surat Perintah 11 Maret 1966, itu semua pengumuman tentang keadaan darurat. Ini yang melahirkan kondisi umum pengecualian di mana masyarakat, negara, dan pemerintah merasa perlu melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa," paparnya.

Bambang Soesatyo juga diminta memberikan pandangan. Dalam paparannya, Bamsoet, sapaan Bambang, mengingatkan bahwa demokrasi dan hak politik rakyat harus sejalan dan tidak boleh tergadaikan oleh kepentingan apa pun. "Bila demokrasi dan hak politik rakyat hanya dipermainkan kelompok tertentu yang hanya mementingkan diri sendiri, unsur pesimisme yang disampaikan Giorgio Agamben atas demokrasi menjadi terbukti. Karena yang akan muncul bukanlah demokrasi sejati, tetapi hanyalah tirani mayoritas. Yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan antara hukum publik dan fakta politik," ujarnya.

Bamsoet menilai, kehadiran buku Agus sangat bermanfaat dalam proses pendidikan politik bangsa Indonesia. Khususnya mendewasakan pola pikir masyarakat dalam memahami, menganalisa, dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Sehingga, demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi yang substansial, tidak hanya demokrasi prosedural semata. ■ KAL